



## A. Latar Belakang

Studi ini akan mengkaji tentang quota keterwakilan politik perempuan yang dipersyaratkan bagi partai politik calon/peserta pemilu, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun calon anggota legislative pada pemilu 2014. Meskipun studi tentang keterwakilan politik perempuan mulai banyak dilakukan,<sup>1</sup> namun studi ini menawarkan dari sisi kebaruan dalam konteks waktu (*time*), yakni pada pemilu 2014, disamping variabel yang diteliti tidak tunggal, namun ganda yakni rekrutmen pengurus dan rekrutmen caleg, sehingga dimungkinkan melihat keterwakilan perempuan lebih tuntas dalam konteks rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Juga tampaknya belum ditemukan kajian serupa.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3 persen), Andorra (50 persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik *Seychelles* (43,8 persen), Finlandia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen), Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikat—negeri yang dianggap demokratis—hanya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.

Secara empirik keterwakilan politik perempuan di Indonesia menemui sejumlah kendala problematik, seperti kesenjangan keterwakilan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, secara formal maupun substansial. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.363 orang, terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Beberapa studi tentang keterwakilan politik perempuan yang telah dilakukan adalah: Ani W. Soetjipto, *Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009*, Program Dukungan Parlemen UNDP, (Jakarta, UNDP, 2010). AD Kusumaningtyas, 2005, “*Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu Tahun 2004: Representasi dan Pandangan Politik*”, Tesis, Program Pasca Sarjana pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta. Astrid Anugerah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009). Emmy St. Margaretha Lumban Raja, *Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Peluang Tantangan*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2008. Fitriyani, “*Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Parpol Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif (Studi kasus caleg perempuan pada 5 partai lokal Aceh)*”, Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Wanita, (Jakarta, 2010).





telah memberikan peluang besar kepada para aktifis perempuan untuk menyuarakan pentingnya menambah jumlah perempuan di DPR dan DPRD. Menurut *International Institute of Democracy and Electoral Assistance* (IDEA, 2003), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan di parlemen, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya dukungan partai politik, kurangnya kerjasama antara perempuan di dalam dan di luar parlemen, norma-norma sosial yang lebih berorientasi pada norma laki-laki, kurangnya dukungan media, sistem pemilu dan kurangnya kuota untuk perempuan (IDEA, 2003). Karenanya, di Indonesia para aktivis perempuan kemudian mengidentifikasi beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di DPR maupun DPRD. Upaya-upaya tersebut antara lain; mendapatkan kuota, memberikan pendidikan kewarganegaraan pada perempuan, menguatkan jaringan perempuan, menyiapkan *data base* perempuan yang potensial untuk menjadi anggota DPR/DPRD, dan bekerjasama dengan media.<sup>2</sup>

Menurut studi *United Nations Division for the Advancement of Women* (UN-DAW), suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas, dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan dalam kehidupan publik apabila mencapai minimal 30-35 persen.<sup>3</sup> Hal ini selaras dengan salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia yang menuntut keterwakilan perempuan di domain politik Indonesia minimal 30 % (*tiga puluh persen*). Pemilu sebagai manifestasi suara rakyat menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili, tak terkecuali perempuan. Supaya dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, lembaga legislatif tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan lembaga legislatif sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.<sup>4</sup>

Hal ini diperkuat lagi pada pemilu 2014, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 8/2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan

---

<sup>2</sup> Wahidah Zein Br Siregar, *Perjuangan dan Peran Perempuan di DPRD Jawa Timur 2004-2009*, tt, hal 4.

<sup>3</sup> Lihat, Marle Karl, *Women and Empowerment: Partisipation and Decision Making*, (London & New Jersey: Zed Book Ltd, 1995), hal. 63-64.

<sup>4</sup> Robert A Dahl, (terj.) *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992 hal. 89-90.



















Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VII

Ketua : Sumarsono

Sekretaris : R. Suwasis Hadi

Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VIII

Ketua : Salahuddin

Sekretaris : Termidzi Faisal

Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah IX

Ketua : Heny Sulistyaningsih

Sekretaris : Sampurno

Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah X

Ketua : Ali Mu'thi

Sekretaris : Subagio

Grace Diana Haryadinata.

Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah XI

Ketua : Hosnan Achmadi

Sekretaris : Murtadlo

Fatmawati

Wiwik Rahmawati

Susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/101/XI/2012 menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah keseluruhan pengurus sebanyak 77 orang, sama dengan susunan pengurus sebelumnya. Adapun komposisi pengurus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 50 orang (65 persen) dan perempuan sebanyak 27 orang (35 persen). Secara kuantitas kuota keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dalam komposisi pengurus DPW PAN Jawa Timur sudah terpenuhi, bahkan melebihi kuota minimal.

Adapun 27 pengurus DPW PAN Jawa Timur dari jenis kelamin perempuan tersebut, ada 5 (lima) orang di jajaran Majelis Penasehat Partai Wilayah (MPPW) antara lain di satu orang jajaran wakil ketua yakni Noer Haidah, satu orang di wakil sekretaris yakni Mas'ad Fachir, dan tiga orang di jajaran anggota yakni Ushaifiroh Qaani, Nurlaila dan Riznatu Nuril Aziz. Sedangkan di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah ada 22 (dua puluh dua) orang antara lain 4 (empat) orang di jajaran wakil ketua dari 19 (sembilan belas) wakil ketua yakni Musfiroh S. Badri, Eny Haryati, Tatik Lutfiati, dan Heny Sulistyaningsih, 13 (tiga belas) orang di jajaran wakil sekretaris dari 31 (tiga puluh satu) wakil sekretaris yakni Fransiska Harroviantin, Mila M. Djamhari, Dewi Janurawati, Nur Laily, Aniek Purwantini, Sri Utami, Ida Fitriana, Siti Asfiah, Lirih Ifa Annisa, Choirotul Fadriyah, Masruro, Tin Anggini, Grace Diana haryadinata.



legislatif, b) pendaftaran calon anggota legislatif, c) verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota legislatif, d) pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota legislatif, e) perbaikan terhadap kelengkapan administrasi calon anggota legislatif, f) melakukan psiko test dan wawancara, g) penentuan nomor urut calon anggota legislatif, h) penyerahan berkas calon anggota legislatif ke KPUD, d) Pelatihan calon anggota legislatif.

Rekrutmen calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN dilakukan secara terbuka. Rekrutmen terbuka dimaknai semua orang, baik kader partai maupun non-kader partai, lintas agama, suku, ras, golongan dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN. Pada rekrutmen terbuka tersebut, KPPW PAN Jawa Timur membuka pendaftaran calon anggota DPRD Jawa Timur. Selain itu, KPPW melakukan rekrutmen dengan pendekatan jemput bola, mendekati tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh adat supaya berkehendak maju menjadi calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN.

Setelah terdaftar para caleg mengikuti rangkaian seleksi mulai seleksi berkas administrative, test psikologi dan wawancara. Selanjutnya dilakukan penentuan nomor urut calon anggota DPRD Jawa Timur dari DPW PAN Jawa Timur menggunakan kriteria dan parameter yang terukur meliputi kualifikasi pribadi, pengabdian kepada partai, proposal aktifitas pemenangan pemilu, *affirmative policy* untuk caleg perempuan, anggota DPRD, dan pengumpulan Kartu Tanda Anggota.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dilakukan skoring untuk menentukan nominasi nomor urut calon anggota legislative. Komite Pemenangan Pemilu Wilayah menentukan tim skoring yang terdiri dari tiga orang yakni Hariyanto, SH, Matlubur Rifa, S.HI dan M. Sodik Nurhadi.<sup>16</sup> Tim ini melakukan skoring berkas pencalegkan di Rumah PAN Jawa Timur dan di Hotel Fortuna di jl. Darmokali, Surabaya. Calon anggota legislative yang mendapatkan skor terbanyak/terbesar ditempatkan di nomor urut 1 (satu), terbanyak/terbesar kedua di nomor urut 2 (dua) dan seterusnya pada setiap daerah pemilihan.<sup>17</sup> Sehingga tersusunlah nomor calon anggota legislative sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wakil Sekretaris sekaligus Sekretaris Eksekutif DPW PAN Jawa Timur, tanggal 8 Oktober 2013 di Rumah PAN Jawa Timur.

<sup>17</sup> Mengingat data hasil skoring masing-masing calon anggota legislative sifatnya *confidential* dan hanya untuk kebutuhan internal, maka data tersebut belum berhasil diperoleh sampai laporan penelitian ini selesai disusun dan dijilid.



		(Surabaya)	
	2	Ir. Sentot Adi Pramono, M.B.A (Surabaya)	Lk
	3	Dra. Futichah Rahmawati (Batu)	Pr
	4	Andi Widiono, S.Pt. (Malang)	Lk
	5	Choirul Anwar (Malang)	Lk
	6	Wiwik Sri Handayani, SH. (Batu)	Pr
	7	H. Qosdus Sabili, SP. M.Si. (Malang)	Lk
	8	Surachman, SH. (Malang)	Lk
<b>Jatim VI (Kediri, Blitar, Tulung Agung)</b>			
	1	A. Basuki Babussalam, SH. MH. (Sidoarjo)	Lk
	2	Mar'atus Sholihah, SE. (Sidoarjo)	Pr
	3	Danil Adjak Assegaf, SE.(Surabaya)	Lk
	4	Agus Prastowo (Sidoarjo)	Lk
	5	Sarwo Edi Sampurno Putro., ST. (Kediri)	Lk
	6	Widya Indriasari (Surabaya)	Pr
	7	Drh. Gunawan Ardianto (Surabaya)	Lk
	8	Wahyudiono, SH. (Nganjuk)	Lk
	9	Cintya Hapsari Kusumaningrum (Surabaya)	Pr
	10	Roki Wardoyo (Sidoarjo)	Lk
	11	Andiny Okta Primanti Puspita (Sidoarjo)	Pr
<b>Jatim VII (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek)</b>			
	1	Suli Daim, S.Pd.MM. ( Sidoarjo)	Lk
	2	Drs. R. Suwasih Hadi (Magetan)	Lk
	3	Putri Anggitasari (Surabaya)	Pr
	4	Damayanti Pertiwi (Ponorogo)	Pr
	5	Linda Kristiana (Trenggalek)	Pr
	6	Ir. Sugeng Yuswiyono, MM. (Pacitan)	Lk
	7	Dian Rahmawati, SE. (Magetan)	Pr
	8	Sumarsono (Magetan)	Lk
	9	Lasmimi (Ngawi)	Pr
<b>Jatim VIII (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun)</b>			
	1	Shalahudin ( Mojokerto)	Lk
	2	Bambang Ongkowidjojo, SH. (Nganjuk)	Lk
	3	Ummi Farida Sya'af (Mojokerto)	Pr
	4	Drs. H. Ali Fikri (Jombang)	Lk
	5	Drs. Sudono Syueb, M.Si. M.H. (Sidoarjo)	Lk
	6	Hanik Fita Amarufa (Pacitan)	Pr
	7	Totok Sudaryanto, ST. (Nganjuk)	Lk
	8	Ernawati Sya'af (Mojokerto)	Pr
	9	Bambang Edi Siswanto, SH. (Jombang) Kusno (Madiun)	Lk

Jatim IX (Tuban, Bojonegoro)	1	Agus Maimun, SE. M.HP (Surabaya)	Lk
	2	H. Reso Handoyo, SH. ( Tuban)	Lk
	3	Heny Sulistyarningsih (Bojonegoro)	Pr
	4	Syaifulloh (Jombang)	Lk
	5	Drs. H.M. Lukman Hakim, MM. (Bojonegoro)	Lk
	6	Lulik Sulistyowati (Tuban)	Pr
Jatim X (Gresik, Lamongan)	1	Drs. H. Husnul Aqib, MM. (Lamongan)	Lk
	2	Ali Mu'ti, SE. MEL. (Surabaya)	Lk
	3	Dra. Sri Muninggar, M.Pd.I (Gresik) (Sidoarjo)	Pr
	4	Prasetyo (Gresik)	Lk
	5	Ratna Diah Rahmawati, S.Sos. (Gresik)	Pr
	6	Retnaning Cahyani, S.Sos. (Lamongan)	Pr
	7	Mohammad Nasruddin, S.Sos. (Lamongan)	Lk
Jatim XI (Bangkalan, sampan, Pamekasan, Sumenep)	1	Malik Efendi, SH. MH. (Sumenep)	Lk
	2	Ir. Fatmawati. MP. (Sumenep)	Pr
	3	Drs. H. Imam Buhari (Sampang)	Lk
	4	Dwi Rida Lisdiana, S.Sos.I. M.Si. (Bangkalan)	Pr
	5	Helmi, S.Pd.I (Sumenep)	Lk
	6	Moh. Ibrohim Salim, SH. (Pamekasan)	Lk
	7	Warisa Khairunisak (Bangkalan)	Pr
	8	Rhahmatullah (Sumenep)	Lk
	9	Try Deasy Harisandy, SE. (Pamekasan)	Pr
	10	Badrus Samsi (Sumenep)	Lk

Sumber: Sekretariat DPW PAN Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Hasil skoring terhadap berkas calon anggota legislative yang telah dilakukan oleh tim skoring lalu dibawa ke rapat harian partai. Pada rapat harian partai dipresentasikan hasil kerja tim skoring, lalu ditanggapi oleh pengurus harian partai. Hampir semua hasil kerja tim skoring disetujui dalam rapat harian partai, kecuali beberapa nama melalui perdebatan yang relative alot, dan berbelit-belit yakni penentuan nomor urut 1 (satu) antara Zainul Lutfie dan Syamsul Huda di daerah pemilihan Jatim 1 (satu) Surabaya dan Sidoarjo, dan penentuan nomor urut 1 (satu) di daerah pemilihan Jatim VII Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek. Namun keputusan akhir menyetujui seluruh hasil kerja tim skoring.<sup>18</sup> Sehingga daftar nomor urut calon

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wakil Sekretaris sekaligus Sekretaris Eksekutif DPW PAN Jawa Timur, tanggal 8 Oktober 2013 di Rumah PAN Jawa Timur.















